

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU (GERBANG SADU) MANDARA DI DESA SIBETAN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM BALI (STUDI PADA KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF)

Aniza Latifa Dinar

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (anizalatifadinar08@yahoo.com)

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

Abstrak

Permasalahan kemiskinan masih dihadapi oleh masyarakat Provinsi Bali. Tingginya jumlah penduduk miskin di Bali menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Bali belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Sejalan dengan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, maka pemerintah Provinsi Bali membuat program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara yang akan menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat pedesaan atau kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang mencakup sarana dan prasarana serta sosial ekonomi pedesaan/kelurahan. Salah satu Desa yang menerima dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara adalah Desa Sibetan. Pada saat program Gerbang Sadu Mandara dilaksanakan, terdapat masalah dilapangan yaitu adanya ketidaksesuaian pada alokasi sasaran program Gerbang Sadu Mandara. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui model implementasi Merilee S. Grindle yang terdiri dari dua variabel yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Interview (wawancara), Observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan mendapatkan respon yang baik dalam pelaksanaan implementasiannya. Program Gerbang Sadu Mandara yang dicetuskan oleh Gubernur Bali dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan telah berjalan dengan upaya yang baik. Dilihat dari isi kebijakan terdiri kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara adalah program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara dapat mengentaskan kemiskinan. Manfaat dari program Gerbang Sadu Mandara belum tercapai secara optimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Sibetan. Derajat perubahan yang ingin dicapai juga belum tercapai secara optimal. Letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber-sumber daya yang digunakan sudah cukup dalam mendukung pelaksanaan dan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan isi dari kebijakan. Sedangkan lingkungan kebijakan yang terdiri dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana sudah berjalan dengan baik sesuai dengan dimana lingkungan pelaksana program tersebut. Meskipun dana bantuan keuangan khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara belum dapat dipergunakan untuk perseorangan dan tidak semua masyarakat mau membentuk usaha ekonomi produktif dengan alasan kurangnya kemampuan dalam mengembangkan suatu usaha, hal ini tidak menyurutkan para pelaksana kebijakan untuk terus mensukseskan implementasi kebijakan tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada para pelaksana kebijakan adalah dengan memberikan kesempatan kepada perseorangan RTM untuk mengelola dana bantuan keuangan khusus (BKK) program Gerbang Sadu Mandara dan melakukan upaya pemberdayaan dalam bentuk pelatihan kepada RTM sehingga dapat meningkatkan kemampuan yang ada di dalam diri masing-masing RTM.

Kata Kunci : Implementasi, Program Gerbang Sadu Mandara

**THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROGRAM MOVEMENT
(GERBANG SADU) MANDARA IN SIBETAN VILLAGE BEBANDEM DISTRICT KARANGASEM BALI
REGENCY
(Study of Productive Economic Business Groups)**

Aniza Latifa Dinar

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (anizalatifadinar08@yahoo.com)

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

The people of Bali Province still faced Poverty problems. The high number of poor people in Bali showed that Bali provincial government has not been able to prosper its people. Various efforts have been made by the provincial government of Bali through strategies and policies in improving the welfare and reduce the poverty. In line with the policy to improve the welfare and poverty reduction, the Bali provincial governments create a program named Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara which will be a forum or place for rural communities or villages in establishing themselves and their environment independently that include social infrastructure and rural economy / wards. One of village that receives funds from special financial assistance (BKK) Gerbang Sadu Mandara is Sibetan Village. At the time of the Gerbang Sadu Mandara program implemented, there is a problem in the field in the discrepancy of allocation in program Gerbang Sadu Mandara. Under these conditions, the researchers interested in conducting research with the title "Implementasi Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali". The purpose of this study is to investigate the implementation of the program Gerbang Sadu Mandara at the Sibetan village District Bebandem, Karangasem Bali.

This type of research is descriptive research with qualitative research approach. The focus of research used in this study through implementation model Merilee S. Grindle which consists of two variables: Content of Policy and Context of Policy. Data collection techniques performed through Interview (interview), Observation (observation), and documentation. While the data analysis techniques used was data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.

The results showed that the program policy Gerbang Sadu Mandara at the Village Sibetan get a good response in the implementation. Gerbang Sadu Mandara program that initiated by the Governor of Bali with the goal of public welfare and reduction of poverty has been running with a good effort. Seen from content of policy consisting of interest affected , type of benefits , envision extent of change , site of decision making , implementor program , resources committed in the program implementation gate sadu mandara mountains been done well in accordance with the contents of these policies .While context of policy consisting of power , interest , and strategy of actor involved , institution and regime characteristic , compliance and responsiveness environment where the program implementers.

Although special financial assistance fund (BKK) Gerbang Sadu Mandara cannot be used for a personal and not all the people want to form a productive economic labor by reason of the lack of the ability to develop a business, did not lessen the policy implementers to continue the success of the implementation of the policy. The advice that can be given by the researchers to the policy implementers is to provide opportunities to individual poor households to manage the special financial assistance fund (BKK) of Gerbang Sadu Mandara program and making efforts to empower poor households in the form of training to enhance the capabilities within each poor household.

Keyword : Implementation, Gerbang Sadu Mandara Program

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional dilaksanakan oleh pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN). Salah satu tujuan dari pembangunan Nasional adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan Nasional berjalan secara efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai akhir Maret 2014 mencapai 28,28 juta orang atau secara persentase sebesar 11,25%. Walaupun terbilang mengalami penurunan sebesar 0,22% pada akhir September namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi, namun terdapat 8 provinsi di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan di bawah 7%, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali (<http://www.bps.go.id>).

Hal tersebut justru menunjukkan bahwa pembangunan Nasional di Indonesia tidak merata. Oleh karena itu, kemiskinan dikatakan sebagai masalah sosial yang masih membutuhkan perhatian khusus, sehingga membutuhkan banyak waktu dan strategi dalam proses penanganannya. Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah kemiskinan yang terdapat di salah satu dari delapan (8) provinsi di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan di bawah 7% yaitu Provinsi Bali.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada akhir Maret 2014 hingga September 2014 mengalami kenaikan. Pada akhir Maret 2014 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali mencapai 185,20 ribu jiwa atau sebesar 4,53%. Pada September 2014 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali mencapai 195,95 ribu jiwa atau sebesar 4,76%. Untuk jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 109.20 ribu jiwa atau sebesar 4,35% dan jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 86.76 ribu jiwa atau sebesar 5,39%. Hal ini, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami kenaikan sebesar 0,23%.

Tingginya jumlah penduduk miskin di Bali menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bali belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus bergerak dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Bali khususnya di daerah pedesaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.

Sejalan dengan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, maka pemerintah Provinsi Bali membuat program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara yang akan menjadi wadah atau tempat bagi masyarakat pedesaan atau kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana serta sosial ekonomi pedesaan/kelurahan. Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara merupakan program/kegiatan yang

menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Program Gerbang Sadu Mandara ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali No.52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Melalui Program Gerbang Sadu Mandara.

Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat di perdesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan Desa serta penguatan institusi lokal ditingkat Desa. Kegiatan Gerbang Sadu Mandara merupakan Program Pemerintah Provinsi yang direncanakan, dilaksanakan dan didanai dari APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2013 melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara ke desa sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) pada masing-masing Desa.

Dana tersebut langsung diberikan Gubernur Bali ke rekening Desa melalui bendahara desa yang kemudian disalurkan ke kantor BUMDES. Dana Gerbang Sadu Mandara dikelola/dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan sebanyak 20% yaitu Rp.200.000.000,- dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat pedesaan khususnya penduduk miskin sebesar 80% yaitu Rp. 800.000.000,- serta dana sebesar Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk dana operasional pelaksanaan kegiatan Gerbang Sadu Mandar (Peraturan Gubernur Bali No. 52 tahun 2013).

Masyarakat merupakan pelaku utama pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di dalam program Gerbang Sadu Mandara. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya didesa seperti Kepala Desa/Perbekel, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), dan Tim Verifikasi Desa berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing, dan pembina agar mekanisme program Gerbang Sadu Mandara tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten (Peraturan Gubernur Bali No. 52 tahun 2013). Sasaran dari Program Gerbang Sadu Mandara yaitu kelompok atau perseorangan masyarakat miskin, kelembagaan Masyarakat di Pedesaan, dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.

Terdapat 8 kecamatan dan 78 desa di Kabupaten Karangasem, namun tidak semua desa menerima bantuan keuangan dari program Gerbang Sadu Mandara. Syarat Desa yang dapat menerima dana bantuan keuangan khusus (BKK) dari Program Gerbang Sadu Mandara adalah desa yang memiliki kepala keluarga (KK) miskin

minimal 500 KK. Salah satu desa yang menerima dana bantuan keuangan khusus (BKK) dari Gerbang Sadu Mandara adalah Desa Sibetan.

Desa Sibetan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. Struktur perekonomian Desa Sibetan masih bercorak agraris sehingga menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini di dukung oleh penggunaan lahan pertanian sebanyak 80% dari total penggunaan lahan desa. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk Desa Sibetan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Tanaman yang dihasilkan pada sektor pertanian di Desa Sibetan adalah salak, padi, dan palawija, namun pada sektor ini, tanaman salak menjadi komoditi yang paling menonjol sebagai hasil andalan pertanian di Desa Sibetan. Oleh karena itu, Desa Sibetan dikatakan sebagai desa penghasil salak.

Sebagai desa penghasil salak, tidak menjamin kehidupan warganya lebih baik. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Desa Sibetan yang menjadi buruh tani atau petani penggarap. Selain menjadi petani, ada pula yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Jumlah penduduk Desa Sibetan tahun 2013 sebanyak 8.725 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.186 KK dengan 562 KK tergolong miskin sedangkan jumlah rumah tangga miskin Desa Sibetan sebanyak 344 RTM. Pernyataan tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Gede Sudiarmika, selaku pendamping program Gerbang Sadu Mandara. Beliau mengatakan bahwa:

“untuk penentuan pemberian Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) program Gerbang Sadu Mandara ditentukan oleh jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin minimal 500 KK miskin. Selain itu penentuan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) program Gerbang Sadu Mandara juga memakai data ppls 2011 ditambah dengan pendataan dari masing-masing dusun yang seharusnya terdaftar di ppls 2011 karena memang keadaannya miskin. Dan seterusnya dibahas dalam musyawarah desa dan ditetapkan sebagai tambahan”.

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS) sesuai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebanyak 1.819 RTS. Jumlah pengangguran masyarakat Desa Sibetan sebanyak 145 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 79 orang dan perempuan sebanyak 69 orang dengan kisaran umur 21 tahun sampai dengan 50 tahun. Sedangkan untuk jumlah pekerja masyarakat Desa Sibetan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 207 orang, swasta/buruh sebanyak

1326 orang, dan rumah tangga petani sebanyak 1.461 orang.

Kegiatan program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan diawali dengan pengembangan usaha ekonomi produktif. Komponen pengembangan usaha ekonomi produktif dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kegiatan ini, dilakukan dengan membentuk sebuah kelompok usaha dimana dalam satu kelompok terdapat 10 orang. Dana bantuan keuangan khusus akan diberikan sesuai dengan usaha yang akan dibuat. Sampai saat ini, kelompok usaha ekonomi produktif di Desa Sibetan telah mencapai 41 kelompok yang terdiri dari 6 kelompok dagang, 10 kelompok ternak babi, 6 kelompok ternak sapi, 5 kelompok menganyam, 5 kelompok pengrajin ate, 3 kelompok kerajinan payung dan 3 kelompok kerajinan payung serta 3 kelompok pandai besi.

Pemerintah penyelenggara program Gerbang Sadu Mandara mengeluarkan Juknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara melalui Peraturan Gubernur Bali No.52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program Gerbang Sadu Mandara. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 tahun 2013. Meskipun tujuan dan sasaran program Gerbang Sadu Mandara ini telah jelas namun, dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai masalah yang dihadapi. Masalah pertama terdapat pada manfaat dan tujuan dari program Gerbang Sadu Mandara yang belum tercapai secara optimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Sibetan. Kedua, derajat perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara juga belum tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah penduduk miskin di Desa Sibetan. Ketiga, terdapat pada rendahnya partisipasi masyarakat yang peran sertanya dalam program Gerbang Sadu Mandara kurang optimal. Keempat, terdapat pada alokasi sasaran Gerbang Sadu Mandara, dimana dalam Juknis Gerbang Sadu Mandara sasaran dari program tersebut yaitu kelompok atau perseorangan masyarakat miskin namun pada realitanya program tersebut tidak hanya pada sasaran kelompok masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) namun juga pada sasaran masyarakat non Rumah Tangga Miskin (RTM). Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Gusti Gede Rai selaku ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Beliau mengatakan bahwa :

“Pada Desa Sibetan sendiri untuk alokasi sasaran GSM, terdiri dari masyarakat RTM dan masyarakat Non RTM yang mempunyai usaha. Jadi, disini kami mengharapkan masyarakat yang tidak mampu untuk membentuk suatu kelompok usaha atau industri kecil yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2015)

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil penelitian serupa milik Muhammad Asfar yang berjudul “Pemanfaatan Dana Bangdes (Bantuan Pembangunan Desa) Studi Implementasi Program Inpres Bangdes di Kabupaten Lamongan. Hasil Penelitian Asfar menunjukkan bahwa implementasi program Bangdes tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, adanya masalah alokasi sasaran sumber daya yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi Program Inpres (Asfar, Muhammad : 2014)

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana proses implementasi Program Gerbang Sadu Mandara yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus melalui Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara. Untuk mengetahui apakah proses implementasi Program Gerbang Sadu Mandara ini berhasil atau gagal maka penulis menganalisis menggunakan model implementasi menurut Merilee S. Grindle.

Model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, dalam (Agustino, 2008: 149-154) berpendekatan top-down. Model implementasi kebijakan publiknya dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle, tingkat implementability kebijakan yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Alasan peneliti memilih model implementasi menurut Merilee S. Grindle, karena setiap variabel pada model implementasi yang diungkapkan pada Grindle telah mewakili komponen dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara yang dilaksanakan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali.

Oleh karena itu, model implementasi yang ditawarkan Merilee S. Grindle sesuai untuk membahas tentang “**Implementasi Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Bali**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini : Mendeskripsikan Implementasi Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memperkaya kajian bidang studi Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Publik.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Desa Sibetan

Penelitian ini berguna bagi aparat Desa Sibetan sebagai bahan evaluasi kebijakan publik yang ada dan dapat menjadi bahan acuan untuk mencermati kembali penerapan dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah berjalan.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini berguna untuk menjadi bahan informasi mengenai Implementasi Peraturan Gubernur No.52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus melalui Program Gerbang Sadu Mandara sebagai salah satu kebijakan publik serta sebagai pedoman untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengawasannya

c) Bagi mahasiswa

Penelitian ini berguna untuk bahan acuan pada penelitian selanjutnya dan dapat sebagai penyempurna penelitian selanjutnya.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) oleh Dye (dalam Widodo, 2012:12) diartikan sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (1984:18), yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan publik menurut William N Dunn (dalam Syaifei, 2006:106), adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan

yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Sedangkan Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *Publik Policy Making*, sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud.

Program Gerbang Sadu Mandara merupakan program/kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Program Gerbang Sadu Mandara akan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana serta sosial ekonomi perdesaan dimana program ini akan menjadi inti dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

Dilihat dari *Content of Policy* atau isi dari kebijakan bahwa program Gerbang Sadu Mandara memiliki kepentingan, manfaat, derajat perubahan, dan tujuan dalam proses implementasinya. Selain itu, karakter dan sikap dari pelaksana kebijakan serta sumber daya (manusia, finansial, dan fasilitas) juga mempengaruhi keberhasilan implementasi program Gerbang Sadu Mandara. Ditinjau dari *Context of Policy* atau lingkup kebijakan, pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara difokuskan pada kekuatan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat di dalamnya mempengaruhi keberhasilan atau program Gerbang Sadu Mandara. Selain itu, struktur birokrasi dan tingkat kepatuhan serta respon dari para pelaksana program Gerbang Sadu Mandara juga difokuskan dan dikondusifkan sehingga pelaksanaan tujuan program Gerbang Sadu Mandara dapat terlaksana secara lebih optimal.

2. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Terdapat beberapa pakar kebijakan yang menganalisis tentang tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Salah satunya adalah menurut William N. Dunn (dalam Budi Winarno, 2012:35) adalah :

- a) Tahap penyusunan agenda
- b) Tahap formulasi
- c) Tahap adopsi kebijakan
- d) Tahap implementasi kebijakan
- e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam Penelitian ini, yang akan dibahas yaitu pada Tahap Implementasi Kebijakan pada Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) dalam Agustino (2012:138) yaitu:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengena. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Publik Policy* mendefinisikan Implementasi Kebijakan, sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Sedangkan, Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Dari tiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: adanya tujuan atau

sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

4. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak, yaitu:

a) Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan. Dalam Penelitian ini, yang menjadi unsur pelaksana adalah Masyarakat, Kepala Desa/Perbekel, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Tim Verifikasi Desa.

b) Adanya program yang dilaksanakan

Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan (2006:31) bahwa Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Dalam penelitian ini, program yang dilaksanakan yaitu Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara.

c) Kelompok sasaran

Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: "target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan". Dalam penelitian ini yang menjadi kelompok sasaran yaitu kelompok atau perseorangan masyarakat miskin, kelembagaan Masyarakat di Perdesaan, dan Kelembagaan Pemerintahan Desa.

5. Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Merille S. Grindle

Model pendekatan *top-down* yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - 1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi (Leo Agustino 2008: 154).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle dalam Agustino (2008: 154-157), amat ditentukan oleh tingkat *Implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5) *Program Implementer* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

- 6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b. **Context of Policy** menurut Grindle adalah:

- 1) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pada kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- 2) *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- 3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan model implementasi Merille S. Grindle dalam menganalisis hasil penelitian yang terdiri dari atas *content of policy* dan *context of policy*. Pada *content of policy* terdiri atas *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan), *Type of benefit* (tipe manfaat), *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), *Program Implementer* (pelaksana program), *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pada *Context of Policy* terdiri atas *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), *Compliance and Responsiveness*

(tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali. bentuk penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan sampling insidental. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Sumber data sekunder berasal dari pedoman wawancara dan arsip pedoman umum mengenai program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan bentuk analisis data oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:246) meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi

Lokasi pelaksanaan penelitian diadakan di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali. Dipilihnya desa Sibetan dikarenakan memiliki tingkat masyarakat miskin di bawah 35% dan sebagian besar warganya menjadi buruh tani atau petani penggarap. Sehingga, peneliti ingin melihat Implementasi Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Bali.

2. Gambaran Umum Program Gerbang Sadu Mandara

Program Gerbang Sadu Mandara merupakan program/kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Program Gerbang Sadu Mandara akan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana serta sosial ekonomi pedesaan dimana program ini akan menjadi inti dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali.

Kegiatan Gerbang Sadu Mandara direncanakan, dilaksanakan, dan didanai dari APBD sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah). Dana tersebut, dikelola/dipergunakan untuk membiayai kegiatan infrastruktur sebesar 20% atau sebanyak Rp. 200.000.000,- dan pengembangan Usaha Perekonomian Masyarakat Perdesaan khususnya penduduk miskin sebesar 80% atau sebanyak Rp. 800.000.000,- serta sebesar 20% atau sebanyak Rp. 20.000.000,- dipergunakan untuk dana operasional pelaksanaan kegiatan Gerbang Sadu Mandara.

Oleh karena itu, pemerintah penyelenggara program Gerbang Sadu Mandara mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Gerbang Sadu Mandara melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program Gerbang Sadu Mandara.

B. PEMBAHASAN

Kebijakan Publik (*public policy*) oleh Dye dalam (Widodo, 2012:12) adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kebijakan publik menurut William N. Dunn (dalam Syafei, 2006:106), adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program Gerbang Sadu Mandara merupakan suatu pedoman yang dibuat pemerintah dalam upaya melaksanakan kebijakan Program gerbang Sadu Mandara. Kebijakan yang dibuat selanjutnya akan di implementasikan. Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn, dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program Gerbang Sadu Mandara merupakan tindakan dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wujud penuntasan kemiskinan.

Dalam pengimplementasikan suatu kebijakan terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yaitu: unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan. Dalam implementasi Program Gerbang Sadu Mandara, yang menjadi unsur pelaksana adalah masyarakat, Kepala Desa/Perbekel, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dan Tim Verifikasi Desa. Dalam penelitian ini, program yang dilaksanakan yaitu Program Gerbang Sadu Mandara. Dan yang menjadi sasaran dalam kebijakan program tersebut yaitu kelompok atau perseorangan masyarakat miskin, kelembagaan masyarakat dipedesaan, dan kelembagaan pemerintahan desa.

Model implementasi kebijakan yang peneliti gunakan sebagai panduan dalam membahas penelitian ini yakni dengan menggunakan model

implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menggunakan dua variabel yakni *Content of Policy* dan *Context of Policy*. Berikut pembahasan peneliti dalam penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Sibetan melalui model implementasi kebijakan Grindle.

a. Content of Policy

1) *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Pada indikator ini, mengatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh implementasi suatu kebijakan.

Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara merupakan program yang dicanangkan dan dicetuskan oleh Gubernur Bali sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Prioritas utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara ini dengan pemberian dana bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa.

Dana bantuan keuangan khusus (BKK) langsung diberikan Gubernur Bali kepada desa melalui rekening desa sebesar Rp. 1.020.000.000. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara yaitu Perbekel/kepala desa sebagai pembina/penasehat dan pengendali program Gerbang Sadu Mandara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas, dan tim pengelola kegiatan (TPK) Gerbang Sadu Mandara yang terdiri dari BUMDes dan LPM.

Kegiatan yang dikelola dalam Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan adalah kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif. Dana yang dipergunakan dalam kegiatan kelompok usaha ekonomi produktif sebesar Rp. 800.000.000. dana tersebut diberikan ke kelompok usaha ekonomi produktif yang telah lulus verifikasi atau dikatakan berhak menerima dana bantuan keuangan khusus (BKK) program Gerbang Sadu Mandara.

Kelompok usaha ekonomi produktif yang terdapat pada Desa Sibetan sebanyak 41 kelompok yang terdiri dari 6 kelompok usaha dagang, 10 kelompok ternak babi, 6 kelompok ternak sapi, 5 kelompok menganyam, 5 kelompok pengrajin ate, 3 kelompok kerajinan payung, 3 kelompok kerajinan bambu, dan 3 kelompok pandai besi. Masing-masing kelompok usaha ekonomi produktif menerima dana bantuan keuangan khusus (BKK) program Gerbang Sadu Mandara

berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki dan dikembangkan.

Pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan, dilihat dari segi kepentingan yang mana telah dijelaskan dalam wawancara dengan narasumber pelaksana kebijakan, bahwa kepentingan dari program Gerbang Sadu Mandara adalah memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin untuk dapat membentuk usaha ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengingat juga pada tujuan umum dari program Gerbang Sadu Mandara yang terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2013.

Sementara itu, dilihat dari masyarakat Desa Sibetan mengenai kepentingan yang diharapkan dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara yaitu dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai masyarakat khususnya untuk rumah tangga miskin benar-benar sangat membutuhkan bantuan agar dapat mensejahterakan keluarganya.

Kepentingan yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan dengan masyarakat Desa Sibetan saling terkait sehingga hal tersebut menjadi alasan pentingnya program Gerbang Sadu Mandara yang dilaksanakan di Desa Sibetan sebagai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi yang ada pada masyarakat.

2) Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Type of Benefits menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan telah menerima respon positif dari masyarakat Desa Sibetan. Hal ini menunjukkan bahwa program Gerbang Sadu Mandara sangatlah bermanfaat baik bagi pelaksana kebijakan dan masyarakat Desa Sibetan.

Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada narasumber yaitu pelaksana kebijakan bahwa manfaat yang dirasakan adalah program Gerbang Sadu Mandara mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki dapat meningkatkan produksi dan pemasaran hasil potensi masyarakat desa serta dapat memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat Sibetan.

Sementara itu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sibetan bahwa dengan adanya program masyarakat mampu mengembangkan usaha yang telah dimiliki serta bunga yang di tawarkan juga sangat kecil sehingga tidak memberatkan masyarakat. namun, manfaat tersebut tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat

Desa Sibetan khususnya masyarakat yang tidak ikut serta dalam pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif.

Manfaat yang dirasakan oleh pelaksana program maupun sasaran program atau peserta dapat dikatakan belum dicapai secara optimal, sebab tidak semua masyarakat Desa Sibetan merasakan manfaat dari pelaksanaan Program Gerbang Sadu Mandara.

3) Extent of Change Envision (Derajat perubahan yang dicapai)

Pada poin ketiga berbicara mengenai *Extent of Change Envision* yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Sebagai pelaksana kebijakan, tentu sangat berharap kebijakan yang dilaksanakannya mendapat respon yang sangat baik dari sasaran kebijakan. Berkaitan dengan derajat perubahan, dalam penjelasan para narasumber yang peneliti temui menjelaskan bahwa perubahan yang ingin dicapai para pelaksana kebijakan terhadap program Gerbang Sadu Mandara adalah tujuan dari program Gerbang Sadu Mandara yaitu kesejahteraan masyarakat Desa Sibetan dan terwujudnya upaya dalam mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, dengan adanya program Gerbang Sadu Mandara diharapkan benar-benar mampu menjadikan masyarakat lebih produktif sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu meningkatkan taraf hidupnya serta lebih banyak lagi masyarakat yang ikut serta dalam program Gerbang Sadu Mandara.

Sementara itu, harapan yang diutarakan oleh masyarakat Desa Sibetan khususnya pada kelompok usaha ekonomi produktif terhadap program Gerbang Sadu Mandara yaitu agar program Gerbang Sadu Mandara dapat terus berkembang dan maju serta tidak pernah ada masalah dalam pelaksanaannya. Harapan yang baik dari kedua belah pihak ini sangat baik dalam mencerminkan rasa kepedulian dalam mendukung kebijakan-kebijakan dari Program Gerbang Sadu Mandara.

Hingga saat ini, jumlah kelompok usaha ekonomi produktif di Desa Sibetan berjumlah 41 kelompok yang terdiri dari 6 kelompok dagang, 10 kelompok ternak babi, 6 kelompok ternak sapi, 5 kelompok menganyam, 5 kelompok pengrajin ate, 3 kelompok kerajinan payung dan 3 kelompok kerajinan payung serta 3 kelompok pandai besi.. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang dengan kegiatan usaha yang berbeda-beda. Dari 41 kelompok usaha ekonomi produktif, terdapat 20 kelompok yang telah mengembalikan dana pinjaman dari program Gerbang Sadu Mandara, sehingga dana tersebut dapat di berikan kepada kelompok usaha ekonomi produktif lainnya yang sudah menyetorkan proposal.

Derajat perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara belum tercapai secara optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat masyarakat Desa Sibetan yang belum ikut serta dalam pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif program Gebang Sadu Mandara.

4) Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

Gubernur Bali sebagai pembuat kebijakan memberikan dana bantuan keuangan khusus (BKK) program Gerbang Sadu Mandara sebesar Rp. 1.020.000.000,- kepada desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Dana tersebut langsung ditransfer ke rekening desa dan selanjutnya seluruh kegiatan program Gerbang Sadu Mandara diserahkan kepada desa untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis program Gerbang Sadu Mandara.

Dalam komponen pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif perdesaan dikelola oleh BUMDes. Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dikelola oleh BUMDes hanya dapat dipergunakan oleh kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat dan tidak dipergunakan untuk keperluan konsumtif. Jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh BUMDes telah diatur dalam Peraturan Desa (Perdes).

Sebagai pelaksana kebijakan narasumber menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan memilih komponen kelompok usaha ekonomi produktif. Pengambilan komponen tersebut didasarkan pada pemikiran untuk mengupayakan masyarakat untuk dapat menciptakan suatu usaha dimana dengan usaha tersebut masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan rumah tangganya sendiri.

Pengambilan keputusan tersebut juga didasari pada kekhawatiran dari pihak pelaksana apabila dana bantuan diberikan kepada perseorangan ditakutkan mereka tidak dapat mengolah dana tersebut dengan baik, sehingga dalam pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif tidak murni RTM, agar kelompok non RTM mampu menggerakkan dan membantu kelompok RTM.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa para pelaksana kebijakan Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem telah mengambil keputusan yang baik sesuai dengan kewenangannya.

5) Program Implementor (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara melibatkan pihak-pihak yang menunjang pelaksanaan program tersebut diantaranya adalah Gubernur Bali sebagai penasehat dan penanggung jawab dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara, tim koordinasi provinsi sebagai verifikasi dan monitoring lokasi dan kegiatan di desa, perbeker atau kepala desa sebagai pembina/penasehat dan pengendali kelancaran program Gerbang Sadu Mandara di desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebagai fasilitator dan pemandu masyarakat dalam mengikuti tahapan pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari BUMDes dan LPM sebagai pengelola kegiatan Gerbang Sadu Mandara.

Dalam pelaksanaan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara di Desa Sibetan, tidak semua pihak yang terlibat berjalan secara optimal sesuai dengan tugasnya seperti Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Hal ini dikarenakan konsep program diawal belum seutuhnya dipahami oleh desa penerima maka ada beberapa yang tidak berjalan. Dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara, terdapat tim pendamping dari provinsi. Kompetensi yang dimiliki oleh para pelaksana sudah sesuai dan sesuai standar. Selain itu, penjelasan yang disampaikan masyarakat mengenai para pelaksana program bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Sesuai dengan uraian di atas, berkaitan dengan pelaksana program dapat dikatakan sangat baik dalam mensukseskan Program Gerbang Sadu Mandara. Kelengkapan dan kompetensi yang memadai dari para agen pelaksana kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

6) Resources Committed (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Penjelasan narasumber berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan bahwa sumber daya dari sisi pelaksana, dana, sarana dan prasarana yang digunakan sudah cukup mendukung program Gerbang Sadu Mandara. Dilihat dari sumber daya manusianya untuk pendamping dan pengawas sudah sangat kompeten

dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dari segi dana dalam pelaksanaan program gerbang sadu mandara sudah cukup untuk membantu masyarakat dalam membuat usaha ekonomi. Sarana dan prasarana dapat dilihat dari pembuatan gedung gerbang sadu mandara yang berfungsi mempermudah masyarakat untuk melakukan konsultasi.

Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara sebanyak Rp. 1.020.000.000 diberikan kepada masing-masing desa penerima program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur sebanyak Rp. 200.000.000 atau sebesar 20%. Pembangunan infrastruktur di Desa Sibetan yaitu pembangunan toko desa. Sebanyak Rp. 800.000.000 atau sebesar 80% dipergunakan untuk pengembangan ekonomi produktif yang terdiri dari pinjaman bergulir kelompok usaha ekonomi produktif sebanyak Rp. 700.000.000 dan pemanfaatan isi toko desa sebanyak Rp. 100.000.000. Sedangkan sebanyak Rp. 20.000.000 dipergunakan untuk biaya operasional seperti komputer, pembuatan cap, biaya rapat di desa, biaya rapat di 10 banjar dinas, biaya perjalanan dan biaya Alat Tulis Kantor (ATK).

Sesuai dengan penjelasan diatas, berkaitan dengan sumber daya yang digunakan Program Gerbang Sadu sudah cukup dalam pengimplementasian program tersebut.

b. Context of Policy

1) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pada kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber berkaitan dengan kekuasaan, sebagai pelaksana Program Gerbang Sadu Mandara memiliki kekuasaan dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013.

Dalam Pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara melibatkan pihak-pihak yang menunjang pelaksanaan program tersebut diantaranya adalah Gubernur Bali sebagai penasehat dan penanggung jawab dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara, tim koordinasi provinsi sebagai verifikasi dan monitoring lokasi dan kegiatan di desa, perbekel/kepala desa sebagai pembina dan penasehat dan pengendali kelancaran program Gerbang Sadu Mandara di Desa, serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari BUMDes dan LPM. Selain itu, para pelaksana kebijakan memiliki kepentingan dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa Sibetan mulai dari sosialisasi program, penyerahan proposal, verifikasi, dan melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha ekonomi program. Pada komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangkan pada bidang pembangunan sarana dan prasarana dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Berkaitan dengan strategi yang digunakan, para pelaksana program lebih berfokus pada konsep pemberdayaan dimana masyarakat mampu mengembangkan potensi diri sesuai dengan kemampuannya dan bergerak dalam kelompok usaha ekonomi produktif sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Namun masih banyak masyarakat Desa Sibetan khususnya RTM belum berpartisipasi dalam pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif. Dalam hal ini dikarenakan, kurangnya rasa percaya diri masyarakat terhadap pengembangan kemampuan yang dimilikinya sehingga mereka ragu untuk mencoba membuat usaha.

2) Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga dan Rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Pada pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara, Gubernur Bali langsung memberikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa penerima bantuan melalui rekening Desa. Dana sebesar Rp. 1.020.000.000,- dikelola oleh BUMDes sebanyak Rp. 800.000.000,- untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan dikelola oleh LPM sebanyak Rp. 200.000.000,- untuk pembangunan sarana dan prasarana, sisanya sebanyak Rp.20.000.000,- tetap berada pada rekening desa dan dipergunakan untuk biaya operasional selama program Gerbang Sadu Mandara berlangsung.

Pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara langsung dilaksanakan oleh aparat-aparat desa. Program ini dilaksanakan dengan menasar pada kelompok usaha ekonomi produktif sehingga dalam proses kegiatannya yang memiliki peranan penting dalam komponen usaha ekonomi produktif adalah pihak BUMDes.

Program ini masih murni dari pemerintah Provinsi dan pelaksanaan kegiatan di desa hanya dilaksanakan pada organisasi desa saja sehingga tidak ada lembaga-lembaga atau pihak lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara juga tersruktur dengan baik.

3) *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dalam menjalankan suatu kebijakan harus adanya kerja sama dari para pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan sehingga program yang akan di jalankan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri. Seperti yang telah di ungkapkan pelaksana kebijakan program Gerbang Sadu Mandara sebagai narasumber bahwa kepatuhan disini bahwa mereka terus mendukung program tersebut dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati sampai mencapai kesejahteraan sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang berupaya untuk mempengaruhi bahkan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Sementara dari pihak masyarakat, mereka mengutarakan bahwa sikap dari para pelaksana baik itu tim pendamping maupun pelaksana yang ada pada kios Gerbang Sadu Mandara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sangatlah baik. Prosedur administrasinya juga sangat jelas dan tidak merumitkan masyarakat serta cepat tanggap dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang memiliki masalah maupun kurang paham.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksana kebijakan sangatlah responsif, tanggap, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara. Melalui koordinasi yang baik, mereka bekerja dengan sepenuh hati demi kesuksesan implementasi kebijakan Program Gerbang Sadu Mandara.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian di Desa Sibetan mengenai Program Gerbang Sadu Mandara yang dianalisis menggunakan model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle, dapat ditarik kesimpulan dari variabel-variabel yang menunjang keberhasilan dari implementasi yaitu pada *Content of Policy* terkait dengan kepentingan yang mempengaruhi implementasi, kepentingan dari pelaksana adalah ingin memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam bentuk usaha ekonomi produktif agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping itu manfaat yang dirasakan oleh pelaksana kebijakan yaitu adanya respon masyarakat untuk berpartisipasi membentuk kelompok usaha ekonomi produktif dan mampu mengembangkan potensi desa melalui usaha ekonomi produktif tersebut. Sementara itu, manfaat

yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara belum tercapai secara optimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Sibetan.

Perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program Gerbang Sadu Mandara juga belum tercapai secara optimal. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat Desa Sibetan yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara Sedangkan harapan dari masyarakat agar dana bantuan dari program Gerbang Sadu dapat digunakan oleh perseorangan dan penambahan kios untuk pasar ekonomi.

Berkaitan dengan pengambilan keputusan di Desa Sibetan adalah pihak BUMDes yang telah diberi wewenang oleh Pemerintah Provinsi untuk mengelola pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan Juknis Program Gerbang Sadu Mandara. Dalam pembentukan usaha ekonomi produktif tidak murni masyarakat RTM, masyarakat non RTM juga ikut berpartisipasi dalam pembentukan usaha ekonomi produktif hal ini dikarenakan agar non RTM mampu menggerakkan kelompok RTM. Mengenai kompetensi pelaksana dan komitmen bekerja pelaksana kebijakan sangatlah baik dan cukup tegas dalam membantu dan mengontrol kelompok usaha produktif di Desa Sibetan. Sumber daya yang digunakan dalam program Gerbang Sadu Mandara sudah cukup mendukung pelaksanaan program tersebut.

Pada *context of policy*, lebih memfokuskan pada konsep pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat mampu mengembangkan potensi diri sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan mengenai lingkungan kebijakan, tidak terdapat lembaga lain yang mempengaruhi implementasi program Gerbang Sadu Mandara. Pihak pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kota (pemkot) hanya berfungsi sebagai pengawas. Variabel yang terakhir adalah sikap para pelaksana dimana sikap para pelaksana program Gerbang Sadu Mandara sangat responsif, tanggap, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanah dari pemerintah demi kesuksesan implementasi kebijakan program Gerbang Sadu Mandara.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Program Gerbang Sadu Mandara di Desa Sibetan mendapatkan respon yang baik dalam pelaksanaan implementasinya. Program Gerbang Sadu Mandara yang dicetuskan oleh Gubernur Bali dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan telah berjalan dengan upaya yang baik. Meskipun dana bantuan keuangan khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara belum dapat dipergunakan untuk perseorangan dan tidak semua masyarakat mau membentuk usaha ekonomi produktif dengan alasan kurangnya kemampuan dalam

mengembangkan suatu usaha, hal ini tidak menyurutkan para pelaksana kebijakan untuk terus mensukseskan implementasi kebijakan tersebut.

B. Saran

Dari hasil pemaparan mengenai implementasi program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) Mandara, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah agar Bantuan Keuangan Khusus melalui program Gerbang Sadu Mandara memberikan kesempatan kepada perseorangan untuk dapat memperoleh dan mempergunakan dana bantuan tersebut. Karena mungkin tidak semua masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik sehingga apabila mereka membentuk kelompok usaha ditakutkan tidak dapat menjalin hubungan dengan baik. Selain itu, diperlukannya strategi untuk dapat meyakinkan masyarakat khususnya RTM agar mau berpartisipasi dalam pembentukan usaha ekonomi produktif sehingga semua masyarakat Desa Sibetan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Strategi yang dapat peneliti berikan yaitu dengan mengadakan pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan kepada RTM sehingga nantinya dapat meningkatkan kompetensi diri RTM dan akhirnya mau membuat kelompok usaha ekonomi produktif dengan kelompok RTM lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan dari buku teks:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Anderson, James. 1984. *Publik Policy Making*. Hold, Rinehart and Winston: New York
- Dunn, William N. 2003. *Analisis kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjamada University press
- Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy*. First Edition. CQ Press. USA.
- Islamy, M. Irfan. 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Mazmania Daniel, Paul Sabatier. 1983. *Implementasi and Public Policy*. London: Scott, Foresman and Company
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: API
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing
- _____. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: MedPres.

Rujukan dari Peraturan & Undang-undang :

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Peraturan Gubernur Bali No. 52 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus melalui program Gerbang Sadu Mandara
- Perpres Nomor 7 tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah

Rujukan dari jurnal dan internet :

- Tiza, Agustinus Longa, dkk. 2014. Implementasi Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) Studi di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Vol. 17 No.2, Universitas Brawijaya
- Asfar, Muhammad. 2014. Pemanfaatan Dana Bangdes (Bantuan Pembangunan Desa) Studi Implementasi Program Inpres Bangdes di Kabupaten Lamongan. Universitas Airlangga

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bali.bps.go.id>

<http://www.bpmpd.baliprov.go.id/id/Gerbang-Sadu-Mandara2>